



Judul : Tingkat korupsi di Asia Tenggara berada di titik kritis
Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2013
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Dewan Setujui Pencairan Remunerasi Kementerian Pendidikan

JAKARTA — Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pencairan remunerasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode Juli-Desember 2013 senilai Rp 989 miliar. Namun Dewan mengajukan sejumlah permintaan atas persetujuan pencairan dana tersebut.

"Harus ada tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan memperbaiki penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)," ujar Wakil Ketua Komisi Pendidikan Syamsul Bachri, dalam kesimpulan rapat kerja Kementerian Pendidikan

dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Pada Juli lalu, Kementerian Keuangan mengesahkan anggaran sebesar Rp 989 miliar untuk remunerasi semester kedua pegawainya. Penerimaannya adalah pegawai tingkat eselon Kementerian dan perguruan tinggi negeri. Namun pencairan itu terhambat oleh persetujuan DPR. Saat itu, Kementerian Pendidikan tengah digoncang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, yang menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan ujian nasional.

Anggota Komisi Pendi-

dikan DPR dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan anggaran tersebut dicairkan untuk memperbaiki kinerja layanan pejabat tingkat eselon tiga. Selama ini, kata dia, banyak orang yang melapor bahwa kinerja pegawai eselon tiga kurang responsif. "Ini harus menjadi perhatian," ujar dia.

Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim berjanji pihaknya sanggup memenuhi persyaratan yang diajukan DPR. Menurut dia, tindak lanjut atas hasil audit BPK masih dilakukan. "Inspektur Jenderal juga sudah ber-

koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," tuturnya.

Ihwal penyaluran BSM dan kinerja eselon tiga, Musliar berjanji hal itu akan diperbaiki. "Kami akan berikan *customer service* yang lebih baik," katanya.

Kendati rencana itu sudah disetujui DPR, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh tetap enggahkan persetujuan pencarian anggaran itu karena dianggap terlambat. "Untuk semester kedua belum dibayar, padahal kementerian lain sudah," ujarnya. ● SUBKHAN